

**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap
Kemiskinan: Studi Kasus Empat Provinsi Otonomi
Khusus Periode 2013-2021**

Kumba Digdowiseiso¹, Tino Rahardian², Lira Hartami³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id, rahardiantino@gmail.com,

lira.hartami12@gmail.com

ABSTRACT

The special autonomous regions experienced fluctuating changes in poverty rates throughout 2013-2021 which were influenced by various factors. This study aims to determine the effect of regional financial performance as measured through the ratio of independence, effectiveness ratio, and the ratio of compatibility of capital spending on poverty based on the Head Count Index (HCI-P0) in the four special autonomous provinces including Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua. Panel data as a combination of time series and the cross-section is obtained secondary from BPS and DJPK. This research method uses the panel data regression method and the Random Effect estimation model which was selected as the best estimator model. Data analysis in this study used the Eviews version 12 computer program. The results of the study stated that the financial independence ratio had a negative and significant effect on poverty. The ratio of effectiveness has a negative and insignificant effect on poverty, and the ratio of capital expenditure has a positive and significant effect. Simultaneously, the independent variable has a significant influence on the dependent variabel.

Keywords: *Regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, regional expenditure compatibility ratio, poverty, special autonomy*

ABSTRAK

Daerah otonomi khusus mengalami perubahan tingkat kemiskinan secara fluktuatif sepanjang tahun 2013-2021 yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio keserasian belanja modal terhadap kemiskinan berdasarkan *Head Count Index* (HCI-P0) di empat provinsi otonomi khusus meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua. Data panel sebagai gabungan *time series* dan *cross-section* diperoleh secara sekunder melalui BPS dan DJPK. Metode penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda data panel dan model estimasi *Random Effect* yang terpilih sebagai model estimator terbaik melalui pengujian Hausman. Analisis data menggunakan program komputer Eviews versi 12, meliputi uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji-t dan uji-F, dan uji koefisien determinasi untuk

mengukur kontribusi model regresi terhadap variabel terikat. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Rasio efektifitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kata Kunci: Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio keserasian belanja daerah, poverty, otonomi khusus

PENDAHULUAN

Analisis kinerja keuangan pemerintah, desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer antarpemerintah untuk pembiayaan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan penduduk merupakan kajian penting di seluruh dunia, seperti di benua Afrika (Akeju & Ojogbede, 2022; Kaakunga, 2006; Mutembe, 2022; Thomas et al., 2022), Timor Leste (Nalle et al., 2022), bahkan di negara-negara yang masih mempraktikkan sistem terpusat, seperti di Cina dan Vietnam (Li & Du, 2021; Pham et al., 2022) maupun sistem kerajaan di Malaysia (Ostwald, 2017; Yusof et al., 2022). Penelitian terbaru (Digdowiseiso et al., 2022) mencakup tata kelola keuangan pemerintah di 33 negara berkembang; baik yang berstatus *lower middle income* (Bolivia, El Salvador, Nikaragua, Guatemala, Honduras, Philipina, termasuk Indonesia) maupun *upper middle income* (Malaysia, Thailand, Paraguay, Peru, Kuba, dan sebagainya).

Indonesia, tidak luput dari kajian-kajian serupa bahkan cukup berlimpah dan mendalam baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Hubungan non-linier desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (Siburian, 2022). Pengaruh kinerja keuangan 33 provinsi terhadap kemiskinan menggunakan PLS-SEM dengan pertumbuhan ekonomi sebagai intervening (Panjaitan, 2021). Kemampuan keuangan daerah-daerah tertinggal (Digdowiseiso & Saputra, 2022; Febriyanto, 2017; Sari et al., 2021; Waoma, 2019). Relasi tingkat kemiskinan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan kinerja keuangan daerah yang diukur melalui indikator derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi PAD dengan *Fixed Effect Models* menunjukkan adanya pengaruh simultan-signifikan sebesar 98,51% (Norsain & Rofik, 2022). Pengaruh kemampuan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara terhadap kemiskinan (Purnomo & Danuta, 2022), Kabupaten Magelang (Mataris & Digdowiseiso, 2022), Provinsi Kalimantan Selatan (Digdowiseiso & Satrio, 2022), Provinsi Bengkulu (Zulyanto, 2012), Sulawesi Selatan dengan pendekatan *Random Effect Models* (Iskandar & Subekan, 2014), Nusa Tenggara Timur (Renggo, 2021), dan lain-lain.

Implikasi dari serangkaian penelitian sebelumnya seperti tersebut di atas, membuktikan banyak hal mengenai relasi kinerja keuangan daerah yang

diukur melalui satu atau lebih indikator terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu yang dijadikan obyek kajian. Penelitian (Havid & Restianto, 2011; Yanto & Astuti, 2020) menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi secara langsung oleh kinerja keuangan daerah, begitu pula dengankualitas alokasi belanja modal. Pembuktian lainnya bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan di 32 Provinsi di Indonesia (Rizqi & Kartika, 2022). Kesimpulan tersebut tidak ditemukan pada variabel tata kelola pemerintah yang baik melalui skor pemerintah daerah dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Kesimpulan berbeda dari (Digdowiseiso, 2016) dengan memasukkan term interaktif (QoG*Gov) bahwa *governance* dan desentralisasi fiskal berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal terbukti memiliki kemampuan untuk mengurangi disparitas daerah di kawasan timur dan barat Indonesia (Amalia, 2012; Fadli, 2014) maupun daerah sebelum dan setelah pemekaran (Salim, 2019). Sedangkan (Sugiyanto et al., 2018) mencatat bahwa desentralisasi fiskal, yang diukur dengan ketergantungan fiskal dan rasio keleluasaan, dapat mengurangi konflik di Indonesia dengan menambah faktor demokrasi, modal sosial, dan ketertiban.

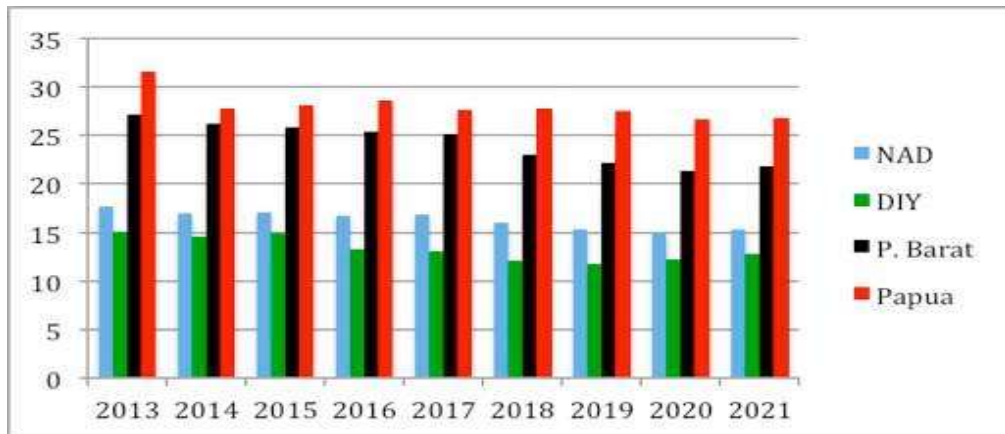
Meski sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur mengenai desentralisasi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019), namun banyak penelitian membuktikan bahwa otonomi daerah membawa kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan meningkatkan rasio kemandirian dan keserasian belanja operasi maupun belanja pembangunan. Pemerintah daerah yang mendapatkan otonomi khusus dapat menjalankan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Saputra, 2020). Kemampuan mengelola keuangan daerah dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang minimal merupakan dua ciri suatu daerah berhasil melaksanakan otonomi (Halim dalam Suseno, 2013).

Otonomi khusus dan keistimewaan adalah varian dari desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) meliputi DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua dan Papua Barat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, maupun motivasi politik lainnya (Pattinasarany et al., 2021). Setiap pembangunan, baik di negara maju maupun berkembang selalu dihadapkan pada persoalan rumit kemiskinan (Budhijana, 2020; Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Namun demikian, dana otonomi khusus

yang terus meningkat setiap tahunnya belum mampu membebaskan provinsi penerima dana otonomi khusus dari lembah kemiskinan (Rahayu

& Febriaty, 2021). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013). Angka kemiskinan di empat provinsi otonomi khusus periode 2013-2021 dapat di lihat pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Angka kemiskinan empat provinsi otsus 2013-2021



Sumber: bps.go.id (diolah penulis, 2023)

Tabel 1 menggambarkan perbandingan tingkat kemiskinan selama 9 tahun, 2013- 2021 untuk empat provinsi otonomi khusus (NAD, DIY, Papua Barat, dan Papua) tanpa memasukan DKI Jakarta dengan pertimbangan sebagai ibu kota negara yang memiliki kualitas kinerja keuangan daerah dan pembangunan sangat tinggi. Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi diantara lainnya, termasuk di Indonesia (Soleh, 2015). Periode 2013-2021, nampak angka kemiskinan di empat provinsi tersebut bergerak fluktuatif cenderung stagnan.

BPS (2021) mencatat angka kemiskinan Papua dan Papua Barat menduduki peringkat 1 dan 2 nasional. Provinsi NAD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dan tertinggi ke-5 skala Nasional dengan persentase kemiskinan 15,53% dan dibawah rata-rata nasional 9,71%. DIY mungkin nampak lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya, DIY merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 11,91%. Kondisi yang demikian tentu akan berkontribusi buruk pada kualitas kesehatan dan pendidikan manusia di wilayah tersebut dan proses pembangunan keberlanjutan pada akhirnya menemui permasalahan sosial lainnya (Amalia, 2012).

Menurunnya angka kemiskinan terkait pada pertumbuhan ekonomi dengan syarat dukungan kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang tepat (Bigsten & Levin, 2000). Buruknya tata kelola tanah ulayat di Kabupaten

Sorong, rendahnya perlindungan dan keberpihakan pemerintahan setempat, membuktikan sulitnya masyarakat untuk mengakses kesejahteraan sepanjang era otonomi khusus Papua 2002-2020 (Taluke et al., 2022). Padahal, kebijakan konversi lahan pertanian di negara berkembang harus melindungi petani dari kemiskinan dan kerentanan (Rochadi et al., 2022). Perbandingan antara otsus dan keistimewaan lihat Tabel 2.

Keterangan	Papua & Papua Barat	NAD	DIY
Mulai berlaku	Papua: 2002 & Papua Barat: 2008	2008	2013
Jangka waktu	20 Tahun (UU No. 21/2001)	20 Tahun (UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh)	Tanpa batas waktu
Besaran dana otsus	2% dari plafon DAU Nasional (UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 34 ayat (3) huruf (e))	Thn ke-1 s.d thn ke-15, 2% dari DAU Nasional. Thn ke-16 s.d thn ke-20, 1% dari DAU Nasional (UU No. 11/2006)	Ditentukan dari Pusat berdasarkan kemampuan APBN dan Keuangan Negara
Pemanfaatan	Pendidikan 30%, Kesehatan 15% (Perda. Provinsi No. 2 tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, Pasal 4 ayat (1) huruf (b))	Mendanai pembangunan & pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. (UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)	Membiayai program dan kegiatan pada 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gub/Wagub, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang (UU No. 13/2012 & Perdais No. 1 Tahun 2013)
Pembagian	Papua, 60%: Kab/Kota dan 40%: Provinsi. Papua Barat: 70% Kab/kota dan 30% Provinsi (Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Surat Keputusan Gubernur)	60%: Kab/Kota dan 40%: Provinsi. (pengalokasiannya didasarkan pada Pergub)	Kewenangan istimewa DIY berada di propinsi (Pasal 6 UU Keistimewaan DIY)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

Tabel 2 merujuk pada bukti regulasi kebijakan dan kelembagaan yang diupayakan kepada empat provinsi otonomi khusus. Namun demikian tingkat ketimpangan dan pertumbuhan saat ini ditentukan oleh tingkat ketimpangan dan pertumbuhan sebelumnya, terdapat indikasi hubungan sistematis antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendidikan, antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan serta

distribusi pendapatan. Dengan demikian investasi modal manusia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Digdowiseiso, 2009). Kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang tepat (Bigsten & Levin, 2000) pada akhirnya terkait pada kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya secara mandiri.

Ada pergeseran dalam tata kelola keuangan daerah. Hal tersebut memberikan dampak kepada kualitas desentralisasi fiskal dalam sistem otonomi daerah. Pada struktur APBD, mulai dikenal istilah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung (Belanja Operasi dan Belanja Modal), Pendapatan Transfer, dan sebagainya. Perubahan lainnya juga terlihat pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mulai dikenal istilah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Mulai digunakannya konsep *Multi Term Expenditure Framework* (MTEF) sejak tahun 2009. Perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) termaktub dalam risalah PP Nomor 105/2000 dan Kemendagri Nomor 29/2002 (Halim, 2013). Kualitas kelembagaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun tingkat desa akan dilekatkan pada tingkat kinerja keuangan daerah.

Naskah ini berkontribusi dalam hal-hal berikut: Berbeda dengan analisis (Hidayat, 2022; Sudja et al., 2022), yang berfokus secara eksklusif pada satu provinsi otonomi khusus yaitu Papua atau di Aceh (Ibrahim, 2021), penelitian ini akan menggabungkan empat provinsi otonomi khusus secara bersama-sama dalam periode 9 tahun, 2013-2021. Kedua, kecuali untuk (Digdowiseiso, 2009, 2016, 2022), beberapa analisis kuantitatif mengabaikan analisis kebijakan dan kualitas kelembagaan, yang (Bigsten & Levin, 2000) menegaskan sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan agenda pengentasan kemiskinan. Padahal, kondisi kemiskinan provinsi otonomi khusus hampir serupa kecuali DKI Jakarta. Ketiga, dengan mengikuti pandangan (Arzaghi & Henderson, 2005; Boadway & Tremblay, 2006; Bodman & Hodge, 2010; Devas et al., 2008; Digdowiseiso, 2016) studi yang diusulkan akan menganalisis pengaruh keuangan daerah terhadap kemiskinan. Berdasarkan kesenjangan penelitian sebelumnya, naskah ini mengkaji hubungan antara keuangan daerah dengan kemiskinan di 4 provinsi otonomi khusus dari tahun 2013 sampai 2021. Selain itu, dalam naskah ini, akan menyelidiki berapa besar pengaruh keuangan daerah melalui 3 indikator: Rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio keserasian belanja modal terhadap kemiskinan di 4 provinsi otonomi khusus, yang meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Dengan demikian, dapat tergambar secara utuh kualitas kinerja keuangan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah

tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Melalui metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Saifuddin, 2012). Alasan pemilihan jenis penelitian kuantitatif karena jenis penelitian ini mampu memberikan penjelasan yang lebih tepat terhadap fakta yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu sekunder yang merupakan data panel terdiri dari data *time series* dan data *cross-section*. Data diambil dari 4 provinsi otonomi khusus yang ada di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Aceh, dan DIY dengan periode 2013-2021.

Data rasio kemiskinan dikumpulkan melalui laman resmi BPS dan data keuangan daerah APBD diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Keuangan (DJPk).

Data sekunder adalah data telah diolah yang diberikan kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2013:193). Arikunto (2013:172) menyebutnya dengan *Paper* yaitu sumber data berupa simbol, sumber ini menyajikan data-data berupa kertas kerja, laporan, gambar, dokumen, peraturan, perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022).

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah menentukan nilai kinerja keuangan daerah yang diukur melalui 3 indikator, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas PAD, dan rasio belanja modal. Indikator tersebut merupakan variabel bebas, sedangkan kemiskinan sebagai variabel terikat. Rumus persamaan masing-masing rasio dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dikali seratus persen. Dengan rasio kemandirian, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola dan mengurus program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri atau masih memiliki ketergantungan yang besar kepada bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2007) kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan

persamaan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100$$

Rumus Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan tentang kemampuan pemerintah

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

daerah mewujudkan PAD sesuai dengan target yang ada dalam APBD. Target ini dihitung setiap tahun berdasarkan data potensi dan realisasi anggaran beberapa tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi daerah pada tahun berjalan. Menurut Mahmudi (2016) dalam menghitung rasio efektifitas PAD dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dengan pendapatan PAD yang mencapai target. Rumus yang dipakai dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal

Perhitungan keserasian belanja daerah, dalam penelitian ini menggunakan rasio belanja modal. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah belanja modal yang terealisasi dengan jumlah belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Dengan rasio para pengambil kebijakan dapat melihat dengan lebih rinci jumlah pengeluaran daerah yang digunakan untuk investasi berupa belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Perhitungan rasio belanja modal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100$$

Setelah menentukan nilai rasio dari masing-masing indikator dan nilai angka kemiskinan, kemudian dapat dilanjutkan dengan menentukan model terbaik yang akan digunakan. Ada 3 model dalam program Eviews, yaitu *Common Effect Models* (CEM), *Fixed Effect Models* (FEM), dan *Random Effect Models* (REM).

Regresi Data Panel

Analisis regresi merupakan alat statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang bersifat kuantitatif, sehingga salah satu variabel dapat diprediksi dari variabel lainnya. Salah satu

pengembangan dari analisis regresi adalah regresi data panel. Ada beberapa keuntungan menggunakan regresi data panel, yaitu mampu mengontrol keheterogenan individual, dengan data *cross-section* diasumsikan homogen tanpa ada pengaruh lain yang masuk, misal waktu, sedangkan pada data *time-series*, data yang didapat akan berubah setiap periode waktu. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari data *cross-section* yang diobservasi berulang pada unit individu (objek) yang sama pada waktu yang berbeda (Gujarati, 2003).

Penggabungan dari kedua data ini dapat mengatasi masalah yang timbul karena penghilangan variabel; memberikan data yang lebih informatif; membangun dan menguji model yang lebih kompleks dibandingkan dengan menggunakan data *time series* atau *cross-section* murni karena data panel merupakan gabungan dari kedua studi ini; serta dapat meminimumkan bias yang terjadi bila mengelompokkan individu ke dalam kelompok yang lebih besar. Menurut Sugiyono (2013) bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model regresi data panel.

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^K \beta_{kit} X_{kit} + \varepsilon_i$$

dengan,

Y_{it} = variabel dependen (nilai yang diprediksikan) unit cross section ke-i untuk periode ke-t

X_{kit} = variabel independen ke-k untuk unit cross section ke-i periode ke-t

β_0 = konstanta slope

ε_{it} = error untuk unit cross section ke-i pada periode ke-tk = banyak parameter regresi yang akan ditaksir

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Models* atau *Common Effect Models* yang sebaiknya dipakai. Prosedur pengujian uji Chow adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005). Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ (Common Effect Model)

H_1 : minimal ada satu $\alpha_i \neq 0$; $i = 1, 2, \dots, n$ (Fixed Effect Model)

Statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{(\bar{RSS}_1 - \bar{RSS}_2) / (N-1)}{RSS_2 / (NT - N - K)}$$

dengan:

N : jumlah individu (data cross section)

T : jumlah periode waktu (data time

series)K : jumlah variabel penjelas

RSS1 : residual sum of squares hasil pendugaan Common Effect Model

RSS2 : residual sum of squares hasil pendugaan Fixed Effect Model

b. Uji Hausman

Uji ini menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas dalam model. Prosedur pengujian uji Hausman adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H0 : Korelasi $(X_{it}, \varepsilon_{it}) = 0$ (Random Effect Model)

H1 : Korelasi $(X_{it}, \varepsilon_{it}) \neq 0$ (Fixed Effect Model)

Statistik uji yang digunakan adalah uji Chi-Square berdasarkan kriteria Wald, yaitu:

$$W = (\hat{\beta}_{MET} - \hat{\beta}_{MEA})' [\text{var}(\hat{\beta}_{MET} - \hat{\beta}_{MEA})]^{-1} (\hat{\beta}_{MET} - \hat{\beta}_{MEA})$$

dengan:

β_{MET} : vektor estimasi kemiringan Fixed Effect Model

β_{MEA} : vektor estimasi kemiringan Random Effect Model

c. Uji Breusch-Pagan

Uji ini menurut Rosadi (2011) bahwa uji Breusch-Pagan digunakan untuk menguji adanya efek waktu, individu atau keduanya. Hipotesis uji Breusch-Pagan adalah sebagai berikut.

H0 : $\sigma e^2 = 0$ (Common Effect Model)

H1 minimal ada $\sigma e^2 \neq 0$ (Random Effect Model)

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N [T\bar{e}]^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

dengan:

T : jumlah unit time

series N : jumlah unit

cross section

e_{it} : residual pada unit ke ke-i dan waktu ke-t

Pengujian Parameter

a. Uji Serentak (F)

Untuk mengetahui apakah model fixed effect pada data panel signifikan maka dilakukan uji hipotesis menggunakan uji F dengan mengasumsikan bahwa gangguan

ϵ_i didistribusikan secara normal. Statistik uji yang digunakan untuk model dengan efek individu sama dengan untuk model dengan efek waktu.

$$F_{hitung} = \frac{(SSE_P - SSE_{DV}) / (N-1)}{(SSE_{DV}) / (NT - N - 1)}$$

b. Uji Parsial (T)

Untuk menguji hipotesis bahwa variabel bebas X_j tidak mempengaruhi variabel terikat Y (dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan), berarti $\beta_j = 0$. Maka perumusannya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_j = 0$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0, j = 0, 1, 2, \dots, k \text{ (k adalah koefisien slope)}$$

di dalam pengujian hipotesis tentang koefisien regresi parsial (β_j), digunakan statistik uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{se(\hat{\beta}_j)}$$

Karena β_j akan diuji apakah sama dengan 0 ($H_0 : \beta_j = 0$), maka nilai β_j dalam persamaan diganti dengan nol sehingga persamaan uji t menjadi:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)}$$

Persamaan tersebut mengikuti distribusi t dengan derajat kebebasan sebesar ($n - k$).

Uji asumsi klasik

Setelah semua tahap di atas sudah dikerjakan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara berurutan langkah-langkah

analisis dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mengambil data rasio indikator kinerja keuangan daerah yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada 4 provinsi otonomi khusus di laman

Badan Pusat Statistik dan DJPK periode 2013-2021. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa variabel bebas terdiri dari: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Rasio Efektifitas (X2), dan Rasio Belanja Modal (X3). Sedangkan variabel terikat adalah Kemiskinan (Y).

2. Setelah menentukan variabel-variabel dalam penelitian maka dilanjutkan dengan langkah ketiga.
3. Melakukan analisis deskriptif terkait masing-masing estimasi model.
4. Melakukan pengujian regresi data panel dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Breusch-Pagan.
5. Mengestimasi parameter model regresi data panel yang terpilih.
6. Melakukan Uji asumsi model regresi data panel.
 - a. Uji normalitas
 - b. Uji multikolinearitas
 - c. Uji heteroskedastisitas
 - d. Uji autokorelasi
7. Menarik kesimpulan dari model regresi data panel untuk menilai besaran pengaruh variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan di 4 provinsi otonomi khusus berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap 1 estimasi CEM. Deskriptif model CEM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. X1 merupakan prediktor signifikan dengan nilai Prob. < 0,05, sementara variabel X2 dan X3 bukan prediktor signifikan dengan nilai Prob. > 0,05.

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/24/23 Time: 21:06
Sample: 2013 2021
Periods included: 9
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.80885	2.492834	10.75437	0.0000
X1	-0.279247	0.075640	-3.691799	0.0008
X2	-0.033519	0.025600	-1.309330	0.1997
X3	0.004012	0.018755	0.213909	0.8320
R-squared	0.705473	Mean dependent var		20.48139

Adjusted R-squared	0.677861	S.D. dependent var	6.171806
S.E. of regression	3.502950	Akaike info criterion	5.449527
Sum squared resid	392.6610	Schwarz criterion	5.625474
Log likelihood	-94.09149	Hannan-Quinn criter.	5.510937
F-statistic	25.54959	Durbin-Watson stat	0.207949
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tahap 2 estimasi FEM. Deskriptif model FEM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Semua variabel bebas bukan prediktor signifikan dengan nilai Prob. > 0,05.

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/24/23 Time: 21:03
Sample: 2013 2021
Periods included: 9
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.98882	1.638031	12.81345	0.0000
X1	-0.122542	0.096713	-1.267074	0.2152
X2	0.027448	0.013368	2.053257	0.0492
X3	0.002012	0.008011	0.251195	0.8034

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.952392	Mean dependent var	20.48139
Adjusted R-squared	0.942542	S.D. dependent var	6.171806
S.E. of regression	1.479402	Akaike info criterion	3.793818
Sum squared resid	63.47025	Schwarz criterion	4.101725
Log likelihood	-61.28873	Hannan-Quinn criter.	3.901286
F-statistic	96.69078	Durbin-Watson stat	0.675889
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tahap 3 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik regresi data panel yaitu dengan melakukan uji chow. Uji chow digunakan untuk memilih model antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	50.136525	(3,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	65.605517	3	0.0000

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Prob. < 0,05 maka terpilih FEM.

Untukkemudian dilanjutkan dengan langkah menentukan model REM.

Tahap 4 Estimasi model REM

Deskriptif model REM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. X1 dan X3 merupakan prediktor signifikan dengan nilai Prob. < 0,05, sementara variabel X2 bukan prediktor signifikan dengan nilai Prob. > 0,05.

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/24/23 Time: 03:22
Sample: 2013 2021
Periods included: 9
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 36
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.04320	1.311971	18.32601	0.0000
X1	-0.115464	0.006356	-18.16506	0.0000
X2	-0.009693	0.007987	-1.213606	0.2338
X3	0.093833	0.024623	3.810727	0.0006

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		1.491336	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.604254	Mean dependent var	20.48139
Adjusted R-squared	0.567153	S.D. dependent var	6.171806
S.E. of regression	4.060500	Sum squared resid	527.6052
F-statistic	16.28666	Durbin-Watson stat	0.438627
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.604254	Mean dependent var	20.48139
Sum squared resid	527.6052	Durbin-Watson stat	0.438627

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dari CEM, sedangkan model REM lebih baik dari FEM. Dengan demikian, model REM merupakan model prediktor terbaik dalam penelitian ini. Namun untuk memastikan model REM yang terpilih perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier* terlebih dahulu.

Tahap 5 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih antara *Common Effect Models* atau *Random Effect Models* yang sebaiknya dipakai. Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini. Apabila nilai Breusch-Pagan < α (5%) maka model yang terpilih adalah *Random Effect Models*. Jika nilai Breusch-Pagan > α (5%) maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Models*.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	7.101505 (0.0077)	0.726011 (0.3942)	7.827516 (0.0051)
Honda	2.664865 (0.0039)	0.852063 (0.1971)	2.486844 (0.0064)
King-Wu	2.664865 (0.0039)	0.852063 (0.1971)	2.717580 (0.0033)
Standardized Honda	4.152558 (0.0000)	1.378862 (0.0840)	0.480384 (0.3155)
Standardized King-Wu	4.152558 (0.0000)	1.378862 (0.0840)	1.111018 (0.1333)
Gourieroux, et al.	--	--	7.827516 (0.0076)

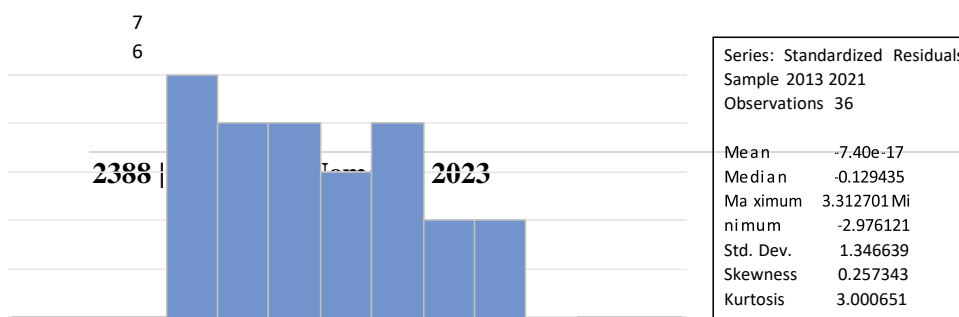
Berdasarkan tabel di atas nilai nilai Breusch-Pagan $0,0051 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa model prediktor terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Models*. Setelah menentukan model prediktor terbaik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik.

Uji Asumsi klasik

Tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolienearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross-section*. Analisis uji asumsiklasik tidaklah digunakan dalam SMART PLS. Hal itu disebabkan karena dalam SMART PLS menggunakan metode pendekatan *Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Ghazali (2016) menyatakan bahwa PLS merupakan suatu metode analisis yang *powerfull*, dikarenakan tidak berdasarkan pada banyaknya asumsi dan data juga tidak harus berdistribusi normal serta ukuran sampel tidak harus besar. Pada penelitian ini hanya melakukan uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dengan melihat signifikansi dari residual yang dihasilkan dan pendekatan histogram. Deteksi normalitas dengan melihat nilai Prob. Hasil uji normalitas dari residual yang diperoleh sebagai berikut :



5
4
3
2
1

Berdasarkan model tabel di atas diketahui nilai Prob. $0,819 > 0,05$ maka disimpulkan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier. Apabila terjadi keadaan ini maka kita akan menghadapi kesulitan untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai kolerasi.

Hasil dari pengujian multikolinieritas pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini :

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.824343	-0.206270
X2	0.824343	1.000000	-0.338675
X3	-0.206270	-0.338675	1.000000

tidak terjadi masalah multikolinieritas. Interpretasi: Berdasarkan tabel di atas, nilai Correlation antara X1, X2, dan X3 sebesar $-0,00 < 0,90$, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas,

namun sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian regresi data panel

Setelah menyelesaikan uji asumsi klasik, maka model hipotesis tersebut dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda dilakukan untuk memprediksi variabel kemiskinan berdasarkan skor Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, dan Rasio Belanja Modal. Hasil Uji Hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran sebuah pernyataan yang berdasarkan teori atau dugaan yang masih lemah tingkat kebenarannya, dan harus di uji serta diverifikasi kebenarannya menggunakan data. Informasi yang dikumpulkan melalui hasil penelitian dan menggunakan teknik tertentu dalam pengujiannya. Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen tingkat kemiskinan atau sering disebut uji kelinieran persamaan regresi. Pengujian ini dilakukan dengan uji F atau simultan dan ujiparsial atau uji t pada data tingkat kemiskinan di 4 provinsi otonomi khusus.

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)Date:
01/24/23 Time: 03:22
Sample: 2013 2021
Periods included: 9
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 36
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.04320	1.311971	18.32601	0.0000
X1	-0.115464	0.006356	-18.16506	0.0000
X2	-0.009693	0.007987	-1.213606	0.2338
X3	0.093833	0.024623	3.810727	0.0006

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		1.491336	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.604254	Mean dependent var	20.48139
Adjusted R-squared	0.567153	S.D. dependent var	6.171806
S.E. of regression	4.060500	Sum squared resid	527.6052
F-statistic	16.28666	Durbin-Watson stat	0.438627
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.604254	Mean dependent var	20.48139
Sum squared resid	527.6052	Durbin-Watson stat	0.438627

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 24,04 - 0,11 X1 - 0,01 X2 + 0,09 X3$$

Uji Hipotesis

a. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian serentak pada Tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,286, dengan α (5%), $k = 3$ dan $n = 36$ maka nilai F tabel adalah 2,87. Dengan hasil yang sudah diketahui, terlihat bahwa F hitung $>$ F tabel, maka tolak H_0 . Artinya variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, dan Rasio Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan.

Cara lain untuk melihat hasil uji F adalah melalui nilai Probability (F-statistic). H_0 : Tidak ada pengaruh X terhadap Y (Prob. $>$ 0,05). H_a : Terdapat pengaruh X terhadap Y (Prob. $<$ 0,05). Berdasarkan tabel hasil regresi berganda nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,000001 <$ 0,05 maka H_a diterima, artinya terdapat pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y.

a. Uji t

Berdasarkan Tabel di atas terkait hasil pengujian parsial *Random Effect Models* pada variabel Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), dan Rasio Belanja Modal (X_3) diperoleh t hitung dan p-value kurang dari α (5%). Artinya kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Rasio Efektifitas (X_2) diperoleh t hitung sebesar -1,213 dan Prob. 2,338 lebih dari α (5%). Artinya, variabel Rasio Efektifitas (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Dengan demikian, berdasarkan tabel hasil regresi diketahui:

$X_1 = 0,0000 <$ 0,05 disimpulkan terdapat pengaruh X_1 terhadap Y, Hipotesis diterima

$X_2 = 0,2338 >$ 0,05 disimpulkan tidak terdapat pengaruh X_2 terhadap Y, hipotesis ditolak

$X_3 = 0,0006 <$ 0,05 disimpulkan terdapat pengaruh X_3 terhadap Y, hipotesis diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R square), Pengujian koefisien determinasi (adjusted R square) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila R square = 0 menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R square semakin besar mendekati 1 akan menjelaskan semakin kuatnya pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen begitu juga bila semakin kecil angkanya sampai mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel di atas, menunjukkan berdasarkan output Eviews versi 12 tampak bahwa hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R Square (R^2) sebesar 0.60, dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Rasio Efektifitas (X2), dan Rasio Belanja Modal (X3) berkontribusi terhadap variabel kemiskinan, serta menunjukkan nilai persentase variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel kemiskinan sebesar 60 persen sedangkan sisanya sebesar 40 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

Interpretasi model

Dalam penelitian ini, model terbaik yang dipilih untuk menjelaskan pengaruh variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Rasio Efektifitas (X2), dan Rasio Belanja Modal (X3) terhadap tingkat kemiskinan adalah Random Effect Model. Pada Tabel di atas terkait Random Effect Models diketahui bahwa prediktor yang berpengaruh signifikan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) dan Rasio Belanja Modal (X3) terhadap Kemiskinan. Sementara Rasio Efektifitas (X2) bukan prediktor signifikan.

Dapat dilihat pada Tabel 1 Angka Kemiskinan, bahwa empat provinsi otonomi khusus merupakan provinsi dengan angka Kemiskinan tinggi secara nasional. Dari kurun waktu selama 9 tahun (2013-2021) Papua dan Papua Barat masih bertahan di posisi 1 dan 2 secara nasional. Begitu juga dengan Aceh dan DIY. Tidak ada perubahan secara kuat untuk mengatasi kondisi tersebut.

Model yang terpilih, variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki korelasi negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan. Setiap

kenaikan rasio kemandirian sebesar 1% mampu menurunkan angka Kemiskinan sebesar 0,115% dengan asumsi bebas variabel lainnya bernilai konstan. Variabel rasio belanja modal memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan. Setiap kenaikan 1% mampu meningkatkan 0.093% Kemiskinan. Karena belanja modal yang rendah dan tidak tepat sasaran dapat memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi dengan kata lain Tingkat Kemiskinan akan semakin tinggi

KESIMPULAN

Variabel rasio kemandirian dan rasio belanja modal merupakan prediktor yang signifikan terhadap Kemiskinan. Di sisi lain, rasio efektifitas bukan prediktor yang signifikan terhadap kemiskinan. Sementara berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan dengan nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R Square (R^2) sebesar 0.60, maka hipotesis yang diambil adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan kata lain, hipotesis tersebut berbunyi variabel rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio belanja modal berkontribusi terhadap variabel kemiskinan, serta menunjukkan nilai persentase variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel kemiskinan di empat provinsi otonomi khusus dan keistimewaan sebesar 60 persen sedangkan sisanya sebesar 40 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Rasio Kemandirian berdasarkan hasil penelitian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi NAD, Papua Barat, Papua, dan DIY lebih meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga pusat laba atau BUMD untuk bekerja lebih optimal, sehingga kemiskinan dapat teratasi. Dengan optimalnya BUMD diharapkan makin terbukanya lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya.
2. Rasio efektifitas berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan begitu sesuai pada landasan pemahaman di awal bahwa rasio efektifitas tidak cukup mampu menurunkan angka kemiskinan tanpa kebijakan dan kualitas kelembagaan yang tepat. Rasio efektifitas hanya mengukur kesesuaian PAD terhadap total pendapatan.
3. Rasio belanja modal berpengaruh signifikan. Hal ini sesuai dengan pandangan di awal bahwa rasio belanja modal terkait dengan masyarakat secara langsung. Pelayanan publik akan lebih baik jika rasio belanja modal

meningkat. Infrastruktur kesehatan, pendidikan yang meningkat akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dengan demikian diharapkan dapat mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan.

KETERBATASAN

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan di 4

Provinsi otonomi khusus dan keistimewaan meliputi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua Barat, dan Papua. Oleh karenanya diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam hal menekan angka kemiskinan.

ACKNOWLEDGMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kumba Digdowiseiso sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Keuangan Publik Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, atas bimbingannya dalam penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akeju, K. F., & Ojogbede, O. (2022). *Fiscal decentralization with autonomy for service delivery and poverty reduction in Ghana* (P. O.-W. Adjei & S. Adu- Gyamfi (eds.); pp. 229–238). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-12378-8_13
- Amalia, F. (2012). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode 2001-2010. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 10(2), 158–169. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02>
- Arzaghi, M., & Henderson, J. V. (2005). Why countries are fiscally decentralizing. *Journal of Public Economics*, 89(7), 1157–1189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.10.009>
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada.
- Bigsten, A., & Levin, J. (2000). Growth, income distribution, and poverty: A review. In *Working Papers in Economics* (Issue 32). <https://ideas.repec.org/p/hhs/gunwpe/0032.html>
- Boadway, R., & Tremblay, J.-F. (2006). A theory of fiscal imbalance. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, 62(1), 1–27. <http://www.jstor.org/stable/40913100>
- Bodman, P., & Hodge, A. (2010). What drives fiscal decentralisation? Further assessing the role of income. *Fiscal Studies*, 31(3), 373–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2010.00119.x>

- BPS Kabupaten Kudus. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha 2017-2021* (W. Juniarti (ed.)). BPS Kabupaten Kudus.
- Budhijana, R. B. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>
- Christianto, T. (2013). Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau. *Volume VII*, (2).
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Devas, N., Alam, M., Delay, S., Korentang, R. O., & Venkatachalam, P. (2008). *Financing Local Government (Commonweal)*. Commonwealth Secretariat.
- Digdowniseiso, K. (2009). Education inequality, economic growth, and income inequality: Evidence from Indonesia, 1996-2005. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*, 00(17792), 1-19. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17792/1/MPRA_paper_17792.pdf
- Digdowniseiso, K. (2016). Governance, fiscal decentralization, and growth in Indonesia. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1-18. <http://repository.unas.ac.id/140/1/14>. KUMBA DIGDOWISEISO S.E.%2CM.App.Ec..pdf
- Digdowniseiso, K. (2022). Is Fiscal Decentralization Growth Enhancing? A Cross-Country Study in Developing Countries over the Period 1990-2014. *Economies*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/economies10030062>
- Digdowniseiso, K., Murshed, S. M., & Bergh, S. I. (2022). How effective is fiscal decentralization for inequality reduction in developing countries? *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010505>
- Digdowniseiso, K., & Saputra, M. W. (2022). Analysis of regional financial capacity : Case study of 62 local governments in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 1247-1259. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3726>
- Digdowniseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1170-1181.
- Fadli, Faishal. (2014). Analisa Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Regional (Studi Kasus Provinsi di Kawasan Timur dan Barat Indonesia Tahun 2006-2012). *Magister thesis*, Universitas Brawijaya.

Febriyanto, D. (2017). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Tertinggal dan Tidak Tertinggal di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua)*. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/969>

Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.

Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.

----- (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Havid, S., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109-124. https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22/18

Hidayat, K. F. (2022). Kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Papua dalam kerangka otonomi khusus tahun 2014-2020. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 394-414.

Ibrahim. (2021). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1), 38-48. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.70>

Indah Pangesti, R. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 274.

Iskandar, A., & Subekan, A. (2014). Kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi fiskal (Studi empiris pada kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1(XII), 79-101. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2834678>

Kaakunga, E. (2006). The impact of fiscal policy on economic growth in Namibia.

South African Journal of Economic and Management Sciences, 9(1), 102-

112. <https://doi.org/10.4102/sajems.v9i1.1160>
- Li, T., & Du, T. (2021). Vertical fiscal imbalance, transfer payments, and fiscal sustainability of local governments in China. *International Review of Economics & Finance*, 74, 392–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.019>
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah kabupaten Magelang tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Mutembei, J. (2022). The role of intergovernmental organizations on poverty reduction in Africa . A critical literature review. *Journal of International Relations and Policy*, 1(1), 33–46.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sanbein, D. S. (2022). Regional financial performance analysis north central timor district. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 150–160. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1938>
- Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 152.
- Ningsih, A. T. (2010). Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Norsain, N., & Rofik, M. (2022). Apakah kinerja keuangan daerah menggambarkan kemiskinan di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405–414. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v20i1.354>
- Ostwald, K. (2017). Federalism without decentralization: Power consolidation in Malaysia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 34(3), 488–506. <http://www.jstor.org/stable/44685077>
- Panjaitan, F. (2021). Pengaruh kinerja keuangan provinsi terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai intervening. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 6(3), 1–20. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2737487&val=14157&title=INFLUENCE OF PROVINCIAL FINANCIAL PERFORMANCE ON POVERTY WITH ECONOMIC GROWTH AS INTERVENING](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2737487&val=14157&title=INFLUENCE%20OF%20PROVINCIAL%20FINANCIAL%20PERFORMANCE%20ON%20POVERTY%20WITH%20ECONOMIC%20GROWTH%20AS%20INTERVENING)
- Pattinasarany, G. D. V., Haerudin, I., Irtanto, P. B., & Iswanto, L. (2021). *Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022–2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri*. Kompak.
- Pham, T. H., Bui, H. N., Do, A. D., Le, A. D., Ha, D. L., & Ngo, H. A. (2022). The

- Impact of fiscal decentralization on poverty reduction in Vietnam. *The Economics and Finance Letters*, 9(2), 235–243. <https://doi.org/10.18488/29.v9i2.3128>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium*, 6(2), 217–240. <http://eprints.ums.ac.id/80956/>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis kemampuan keuangan daerah terhadap kemiskinan: Studi empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis perkembangan dana otonomi khusus sebagai implementasi desentralisasi fiskal di Propinsi Aceh. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2(1), 360–367. <https://doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284>
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(6), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Renggo, Y. R. (2021). Pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13226>
- Rizqi, I. P., & Kartika, A. G. (2022). Analisis tata kelola pemerintah terhadap kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 263–272. <https://doi.org/10.21776/jdcss>
- Rochadi, A. S., Sadiyatunnimah, S., & Salim, K. (2022). Agricultural Land Conversion and Human Trafficking in Northern Java Island, Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 12(3), 173–181. <https://doi.org/10.55493/5005.v12i3.4563>
- Salim, M. N. (2019). Analisis kinerja keuangan dan ekonomi pemerintah daerah sebelum dan setelah pemekaran. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 436–451. <https://doi.org/10.15294/efficient.v2i2.29162>
- Saputra, M. H. (2020). Pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi Aceh. *Quantitative Economics Journal*, 3(4).
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja

- Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *INOVBIJ: Jurnal Inovasi Bisnis*, 148.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). *Skripsi Program Ekonomi Akuntansi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 82.
- Susilo, G. T. B., & Adi, P. H. (2007). Analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah: Studi empiris di propinsi Jawa Tengah. *Paper pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Surabaya.
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis kemampuan keuangandaerah pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 45–54. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.324>
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493>
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *EKOMBISREVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 197–209. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>
- Sudja, M. D., Digidowiseiso, K., Susilawati, D., & Dian, I. (2022). Analysis of fiscal dependence of local governments in Papua province in the special autonomic era. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI- Journal)*, 5(3), 25783–25791. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6624> 25783
- Sugiyanto, E., Digidowiseiso, K., Zulmasyhur, & Setiawan, H. (2018). Fiscal decentralization and routine conflict in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(4), 961–969.
- Suseno, D. A. (2013). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa Tengah pasca diterapkannya desentralisasi fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1710>
- Taluke, D., Djohan, D., Rochadi, A. S., & Djafar, T. M. (2022). Politik Pengelolaan Tanah Ulayat pada Era Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Pendidikan Dan*

- Konseling (JPDK)*, 4(4), 5398–5407.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6339>
- Thomas, N. D., Mbiydzennyuy, S. C., & Wiykiynyuy, T. M. (2022). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations in Sub-Saharan Africa: A critical literature survey and perspectives for future research in Cameroon. *PanAfrican Journal of Governance and Development*, 3(2), 166–193.
- Waoma, S. (2019). Analisis komparasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(2), 28–37. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.194>
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasibelanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(3), 346–357.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484>
- Umayatu, Suiroh R. S. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonom-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 231.
- Yusof, Y., Kalirajan, K., & Mohamad, A. (2022). Fiscal decentralization and convergence in government spending in Malaysia. *International Journal of Finance & Economics*, 27(3), 2669–2681.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijfe.2293>
- Zulyanto, A. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 31.
<https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>